

**DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016**

ABSTRAK

Dalam hukum positif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikonstruksikan sebagai pembantu kepala kantor dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk melaksakan kegiatan-kegiatan tertentu, yaitu membuat alat bukti mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang obyeknya hak atas tanah, kewenangan PPAT dalam membuat alat bukti tersebut dibatasi oleh materi (isi), lokus (daerah kerja) dan tempus (waktu). Pengaturan tentang lokus/daerah kerja tersebut mengalami perubahan, yang mana sebelumnya daerah kerja PPAT adalah meliputi satu wilayah Kantor Pertanahan dirubah menjadi satu wilayah propinsi. Dengan perluasan daerah kerja tersebut akan menyebabkan PPAT berwenang untuk membuatkan alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di dalam daerah kerja PPAT. Ratio legis perluasan daerah kerja PPAT adalah agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan PPAT. Perluasan daerah kerja itupun berpotensi terjadi disharmoni antara peraturan mengenai pendaftaran tanah yang mengkonstruksikan PPAT sebagai pembantu kepala kantor pertanahan dengan peraturan jabatan PPAT yang memiliki daerah kerja lebih luas dari pada yang dibantu (kantor pertanahan).

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Daerah Kerja, Pelayanan Masyarakat.

**REGIONAL WORKING OFFICERS OF MAKERS OF LAND
ACTIVITIES BY GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 YEAR
2016**

ABSTRACT

In the positive law of Land Certificate Official (PPAT) constructed as head office assistant within land registration implementation to execute certain activities, which is establish the evident instrument of certain law behavior of land right as the object, the PPAT authority in making the evident instrument is limited by material (content), locus (location) and tempos (time). The arrangement of Locus/location is revised, which is previously, PPAT working area is covering one Land Office region changed to one province region. That Expansion will cause the authorized PPAT to make evident instrument of certain land law-behavior which is located inside PPAT working area. The PPAT Working area expansion legitimate ratio is aim to simplify people to get the PPAT services. That expansion is potentially created disharmony between the regulation of land registration that constructed PPAT as land head office assistant and the regulation of PPAT position that own the larger area rather than those who assisted (Land Office).

KeyWords : Official Certifier of Title Deeds, Regional Working, Society Service.